

Judul : Fasum rusak akibat unjuk rasa, perbaikan fasilitas publik jadi prioritas
Tanggal : Sabtu, 06 September 2025
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

Fasum Rusak Akibat Unjuk Rasa Perbaikan Fasilitas Publik Jadi Prioritas



Danang Wicaksana Sulistya

ANGGOTA Komisi V DPR Danang Wicaksana Sulistya mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) memperbaiki seluruh fasilitas umum (fasum) yang rusak akibat aksi unjuk rasa akhir pekan lalu. Perbaikan fasum itu mesti meliputi kerusakan fasilitas di tingkat pusat maupun daerah. "Kebutuhan anggaran perbaikan fasum yang rusak dapat dimasukkan dalam rencana Tahun Anggaran 2026," saran Danang dalam keterangannya, Jumat (5/9/2025).

Diketahui, KemenPU menghitung total kerugian akibat aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia mencapai hampir Rp 900 miliar. Estimasi tersebut mencakup berbagai infrastruktur meliputi 21 gedung rusak ringan, 18 gedung rusak sedang, dan 35 gedung rusak berat di berbagai provinsi.

Provinsi dengan nilai kerugian tertinggi adalah Jawa Timur (Jatim). Sebab sejumlah infrastruktur yang dibakar, meliputi Gedung Negara Graha di yang merupakan cagar budaya, Kantor DPRD Kota Kediri dan lain-lain.

Danang melanjutkan, perbaikan fasilitas publik harus menjadi prioritas agar masyarakat kembali mendapatkan pelayanan yang layak pasca terjadinya kerusakan. Sebab, kerusakan yang ditimbulkan

cukup masif dan merata di berbagai daerah.

Karena itu, Danang meminta KemenPU menyiapkan langkah cepat untuk pemulihan dengan memperhatikan alokasi anggaran yang memadai. Komisi V DPR akan terus mengawal proses perbaikan infrastruktur publik tersebut agar dapat direalisasikan secara tepat sasaran.

"Kehadiran negara melalui perbaikan fasum sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab dalam melindungi kepentingan masyarakat luas," tandas politikus Gerindra ini.

Ketua Komisi V DPR Lasarus meminta KemenPU menyisihkan anggaran dari sumber mana pun untuk segera membangun fasum rusak akibat aksi unjuk rasa yang terjadi akhir pekan lalu. Tujuannya agar roda pemerintahan daerah berjalan kembali.

"Karena roda pemerintahan daerah adalah bagian dari roda pemerintahan negara ini," ujarnya.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, pihaknya bergerak cepat memulihkan fasum yang rusak tersebut. Langkah itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus komitmen Kementerian PU memastikan fasilitas publik kembali berfungsi demi kelancaran aktivitas warga.

"Kementerian PU akan segera membentuk tim teknis untuk melakukan assessment lapangan. Dengan begitu, proses rehabilitasi dapat segera dimulai," kata Dody dalam keterangannya, Kamis (4/9/2025).

Menurut Dody, perbaikan difokuskan pada pemulihan fungsi layanan transportasi publik dan fasilitas pendukungnya, guna memastikan mobilitas warga tidak terganggu.

KemenPU memastikan rehabilitasi fasum dapat segera dilakukan untuk memulihkan fungsi layanan publik dan mendukung stabilitas sosial di Jakarta. Anggaran perbaikan fasum telah disiapkan KemenPU dengan mekanisme tanggap darurat. ■ TIF